

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2010-2015**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Risqa Amalia
135020101111043**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

Yang disusun oleh :

Nama : Risqa Amalia
NIM : 135020101111043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2017.

Malang, 27 Februari 2017

Dosen Pembimbing,



Al Muizzudin Fazaalloh, SE., ME.

NIP. 19860403 201504 1 002

ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015

Risqa Amalia, Al Muizzudin Fazaalloh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: amaliarisqa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh PAD perkapita, unconditional grants (DAU dan DBH) perkapita, pertumbuhan penduduk, dan belanja daerah perkapita tahun sebelumnya (t-1) terhadap belanja daerah perkapita serta kemungkinan terjadinya fenomena flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel yang menggunakan program eviws 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD perkapita, unconditional grants (DAU dan DBH) perkapita, dan belanja daerah perkapita tahun sebelumnya (t-1) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah perkapita. Sedangkan pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah perkapita. Serta terdapat fenomena flypaper effect yang berarti bahwa masih rendahnya kemandirian daerah pada desentralisasi fiskal di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015.

Kata kunci: flypaper effect, PAD perkapita, unconditional grants perkapita, belanja daerah perkapita, pertumbuhan penduduk, desentralisasi fiskal

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah diimplementasikan oleh adanya desentralisasi, karena dipandang memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Salah satu kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *money follow function* untuk menciptakan kemandirian daerah. Selaras dengan UU No.32 dan No.33 th.2004 yang menunjukkan secara tegas bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada sisi belanja. Dengan diskresi belanja tersebut, maka kualitas belanja daerah akan sangat ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pemda dituntut untuk dapat menyusun strategi yang tepat dalam mengelola dan mengalokasikan secara efisien, sehingga mampu berperan aktif dalam mendukung perekonomian nasional. Menurut UU No.32 dan No.33 thn.2004, sumber dana utama pemda berasal dari PAD yang dipakai untuk belanja modal dan pembangunan. Selain itu terdapat bantuan transfer pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan. Namun, permasalahan saat ini adalah pemda terlalu menggantungkan alokasi dana transfer untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya dalam bentuk PAD. Disaat alokasi dana transfer pemerintah pusat yang diperoleh pemda besar, maka pemda akan berusaha agar di periode berikutnya dana transfer tersebut tetap besar pada nominalnya. Menurut Kuncoro (2004), PAD hanya mampu membiayai belanja daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemda. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap dana transfer daripada PAD, inilah yang disebut dengan *flypaper effect* (Oates, 1999 dalam Oktavia, 2014).

Terdapat beberapa kajian mengenai *flypaper effect* yang dilakukan di berbagai daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Afrizawati (2012), Hartati (2009), Masdjojo dan Sukartono (2009), Santoso *et al* (2015) dan Wulansari (2015) yang mempunyai kesimpulan bahwa variabel independent DAU, PAD, DBH telah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah dan telah ditemukan adanya *flypaper effect*. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Cardenas dan Sharma (2015), Iskandar (2012), Amalia (2015), Pertiwi (2013) dengan penelitian variabel yang sama menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah namun tidak terjadi, Iskandar (2012), Amalia (2015), Pertiwi (2013) dengan penelitian variabel yang sama menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah namun tidak terjadi *flypaper effect*.

Jika dilihat dari perkembangan tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur juga telah mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,65 poin, sehingga memberikan kontribusi terhadap nasional sebesar 14,36% di tahun 2015. Menurut Sasana (2011), jika dilihat dari aspek makro ekonomi, perkembangan PDRB yang positif akan menuntut penyediaan anggaran belanja daerah yang semakin besar juga. Namun, pada faktanya perkembangan realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015 telah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, isu efisiensi belanja daerah menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi makro ekonomi, yang dialokasikan pada sektor-sektor pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan pada pendapatan dan belanja tersebut, maka akan mengindikasikan bahwa penggunaan belanja daerah lebih besar terserap dari dana transfer dibandingkan dengan PAD, yang akan memicu adanya fenomena *flypaper effect*. Dengan timbulnya gap ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah tahun sebelumnya, PAD, *unconditional grants*, dan pertumbuhan penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, serta mengindikasi adanya fenomena *flypaper effect*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*), dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). *Flypaper effect* pertama kali dikenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) yang menurut Dougan dan Kenyon (dalam Oktavia, 2014) pengertian dari *flypaper effect* adalah suatu keganjilan dimana kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*) yang berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2001 tentang perubahan kedua, belanja pemerintah terbagi dalam dua kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Hubungan Transfer tidak bersyarat (*Unconditional grants*) dengan belanja daerah adalah dengan adanya dana transfer khususnya *Unconditional grants* ini merupakan insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut akan digunakan untuk membiayai Belanja Daerah serta Pembiayaan lain-lain daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu cerminan yang merupakan wujud aspirasi masyarakat yang disusun secara terencana dan didasarkan pada kebutuhan pengeluaran oleh pemerintah daerah yang memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dan berorientasi kepada kepentingan publik. Menurut Hanafi dan Nugroho (2009), peningkatan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang menghendaki adanya pelayanan pemerintah.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam kurun waktu 6 tahun yaitu tahun 2010 hingga 2015. Objek penelitian dilakukan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dengan jenis data panel. Model yang digunakan berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Cardenas dan Sharma (2015).

Pengolahan data menggunakan alat bantu program *evIEWS* 9. Sumber data diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Model yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BD_{it} = \alpha_0 + \beta_0 BD_{it-1} + \beta_1 UG_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 PG_{it} + \epsilon_t$$

Keterangan:

BD_{it}	: Belanja Daerah per kapita dari daerah i di tahun t
α	: Intercept
BD_{it-1}	: Tenggat terikat (lag dependent) Belanja Daerah per kapita dari daerah i di tahun t
UG_{it}	: <i>Unconditional Grants</i> (DBH+DAU) per kapita dari daerah i di tahun t
PAD_{it}	: Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita dari daerah i di tahun t
PG_{it}	: Pertumbuhan Penduduk (<i>Population Growth</i>) dari daerah i di tahun t
$B_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien Regresi
ϵ_t	: Error Term

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perkembangan belanja daerah perkapita, *unconditional grants* perkapita, dan PAD perkapita mengalami kenaikan pada tahun 2010-2015. Namun pada perkembangan pertumbuhan penduduk telah mengalami penurunan. Berdasarkan hasil dari uji chow dan uji LM yang telah dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan hasil bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model terbaik untuk regresi data panel pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan regresi panel REM, menunjukkan nilai R-squared yang berarti bahwa variabel independent yang terdiri dari Lag Belanja Daerah perkapita, *Unconditional Grants* (Transfer tak bersyarat) perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perkapita dan *Population Growth* (Pertumbuhan Penduduk) mampu menjelaskan varians dari variabel dependent yaitu Belanja Daerah perkapita sebesar 96,04%. Sedangkan 3,96% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pada uji f diperoleh hasil yang berarti bahwa variabel independent yang terdiri dari Lag Belanja Daerah perkapita, *Unconditional Grants* perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perkapita dan Pertumbuhan Penduduk secara bersama-sama (simultan) telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pada variabel Lag Belanja Daerah perkapita mempengaruhi secara signifikan positif terhadap Belanja Daerah perkapita, yang berarti bahwa anggaran belanja daerah perkapita tahun (t) dipengaruhi oleh belanja daerah perkapita tahun sebelumnya (t-1). Sehingga setiap terjadi kenaikan seribu (Rp 1.000) pada Belanja Daerah perkapita tahun sebelumnya (t-1) maka Belanja Daerah perkapita tahun ini (t) akan mengalami kenaikan sebesar Rp 84,88. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa telah sesuai dengan teori. Menurut Mardiasmo (2002), pada pendekatan anggaran tradisional atau anggaran konvensional menampilkan anggaran dalam perspektif sifat dasar dari sebuah pengeluaran atau belanja yang menggunakan konsep *incrementalism*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih cenderung kepada desentralisasi belanja (pengeluaran) daripada desentralisasi *revenue* (penerimaan).

Pada *Unconditional Grants* (Transfer tak bersyarat) perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah perkapita, yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan seribu (Rp 1.000) pada Transfer tak bersyarat (*Unconditional Grants*) Perkapita maka Belanja Daerah perkapita akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.176,12. Hasil penelitian ini memperkuat dari adanya teori penyusunan anggaran bersifat *incrementalism* yaitu alokasi anggaran belanja daerah akan menyesuaikan dengan perubahan jumlah anggaran pendapatan daerahnya. Hasil penelitian ini mendukung temuan empiris dari Holtz-Eakin et al (1985) dalam Masdjojo dan Sukartono (2009), Darwanto dan Yulia (2007) dalam Iskandar (2012) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, yang secara spesifik menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymetric*.

Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Perkapita, yang berarti setiap terjadi kenaikan seribu (Rp 1.000) pada PAD perkapita maka Belanja Daerah perkapita akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.013,5. Hubungan ini sesuai dengan

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah PAD akan digunakan untuk membiayai Belanja Daerah serta pembiayaan lain-lain daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan empiris dari Maimunah dan Akbar (2008) yang mengemukakan tentang *taxspend hypothesis* yaitu pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai PAD maka akan semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah.

Pada variabel pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap belanja daerah perkapita. Temuan ini tidak selaras dengan teori yang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu cerminan yang merupakan wujud aspirasi masyarakat yang disusun secara terencana dan didasarkan pada kebutuhan pengeluaran oleh pemerintah daerah yang memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dan berorientasi kepada kepentingan publik. Hasil ini disebabkan karena pertama, adanya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2015, sedangkan belanja daerah perkapita tahun 2010 hingga 2015 menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Kedua, terdapat kurangnya barang publik yang diproduksi oleh pemerintah daerah dari adanya peningkatan belanja daerah. Ketiga, tingginya pajak atau retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari adanya barang publik tersebut. Seperti analogi argumen "*The Tiebout Model*" dengan ungkapannya yaitu "*Love it or Leave it*". Hasil penelitian ini juga mendukung temuan empiris dari Herlina (2013) yang mengemukakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara teoritis jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu kekayaan dan modal dasar pembangunan, akan tetapi juga dapat memicu berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang dan papan. Kondisi inilah yang menyebabkan penduduk lebih diposisikan sebagai beban pembangunan daripada sebagai modal pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditemukan bahwa variabel *Unconditional Grants* perkapita dan PAD perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah perkapita. Kemudian nilai koefisien *Unconditional Grants* perkapita lebih besar dari nilai koefisien PAD perkapita yakni $1,176121 > 1,013503$. Hal ini membuktikan bahwa telah menunjukkan fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. Studi ini mendukung temuan empiris Afrizawati (2012), Aswar dan Subakti (2013), Hartati (2009), Masdjojo dan Sukartono (2009), Santoso *et al* (2015), dan Wulansari (2015) yang juga telah menemukan fenomena *flypaper effect*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur telah menunggu dana transfer dari pemerintah pusat sebelum menentukan besarnya belanja yang akan dihabiskan, sehingga belanja pada periode selanjutnya cenderung lebih besar jumlahnya. Hal ini yang telah membuktikan bahwa terjadi perilaku asimetris pada keuangan daerah yang bertolak belakang dari prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi, sehingga mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah, sementara terjadi penghematan dalam pengoptimalan pengeluaran yang berasal dari PAD yang berakibat jangka panjang. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sagbas dan Saruc (2008) dalam Mulya dan Bustaman (2016) mengatakan bahwa, terdapat dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *Flypaper Effect* yang sering digunakan yaitu *Fiscal illusion* dan *The Bureaucratic Model*. Serta selaras dengan teori "*money sticks where it hits*".

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Transfer Tak Bersyarat (*Unconditional Grants*) perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkapita terhadap Belanja Daerah perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Sedangkan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Serta terdapat fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran supaya pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur lebih tidak bergantung pada pemerintah pusat atau lebih mandiri dalam menjalankan desentralisasi fiskal, antara lain adalah perbaikan sistim penyusunan

strategi pengalokasian keuangan daerah dengan menggali potensi sumber PAD baru seperti BUMD pada sektor pariwisata. Mengadakan pelatihan bagi masyarakat dan para aparat pemerintahan untuk meningkatkan kemampuannya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan metode GMM (*Generalized Method of Moment*) untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada data panel dan penggunaan variabel terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol.2, No.1.
- Amalia, Fitri. 2015. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi Manajemen*, Vol.11, Hlm.15-25.
- Amrozi, A. Imam, Wahidahwati dan Riharjo, I. Budi. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol.2, No.9.
- Aswar, Khoirul dan Subakti, Lidya Printa. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Indonesia. *Proceding PESAT*, Vol.5.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. 2015. Jawa Timur Dalam Angka. jatim.bps.go.id. Diakses 14 Desember 2016.
- Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur. bpkad.jatimprov.go.id. Diakses 14 Desember 2016.
- Cardenas, Oscar J dan Sharma, Amarendra. 2015. Mexican Municipalities the Flypaper Effect. *Public Budgeting&Finance* 77(81).
- Courant, P.N., Gramlich, E.M., Rubinfield, D.L., 1979. The stimulative effects of intergovernmental grants: or why money sticks where it hits, In P. Mieszkowski and W.H. Oakland, eds. *Fiscal Federalism and Grants-in-Aid*, Washington D.C.: *The Urban Institute*, 5-21.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. djpk.depkeu.go.id. Diakses 14 Desember 2016.
- Hanafi, Imam dan Nugroho, Tri Laksono. 2009a. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang, Universitas Brawijaya Press(UB Press).
- Hanafi, Imam dan Nugroho, Tri Laksono. 2009b. *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang, Universitas Brawijaya Press(UB Press).
- Hartati. 2009. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Herlina, Elita. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol.4, No.1.
- Iskandar, Irham. 2012. Flypapaer Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.13, No.1, Hlm.113-131.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang, BPFE Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 47 – 63.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Ekonomi Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Maimunah, Mutiara dan Akbar, Rusdi. 2008. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/Kota di pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 11, No.1, Hlm. 37-51
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi IV*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi Offset.

- Masdjoko, G.N dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal Telaah Manajemen*, Vol.6, Edisi.1, Hlm.32-50.
- Mulya, Rahmatul dan Bustamam. 2016. Pengaruh Flypaper Effect pada Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.1, No.2.
- Oates, Wallace. 1999. An Easy of Fiscal Federalism. *Journal of Economics Literature*, 37:1120-1149.
- Oktavia, Deni. 2014. Flypaper Effect:Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.12, No.12.
- Pertiwi, Maria Rosita. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Indikasi Terjadinya Fenomena Flypaper Effect Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Periode 2009-2010*. Skripsi. Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala.
- Santoso, Imam, I Wayan Suparta dan Saimul. 2015. Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.4, No.2.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.18, No.1, Hlm.46-58.
- Tresch, Richard.2002. *Finance Public Anormative Theory*. Department of Economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wulansari, D. Tri. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)*. Skripsi. Surakarta, Universitas Muhammadiyah.
- Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Tesis. Semarang, Universitas Diponegoro.